

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan entitas yang berperan penting dalam sistem ekonomi untuk mengintermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana surplus. Suatu lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti peminjaman, investasi, dan jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan dapat berupa bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal yang diatur oleh peraturan dan standar tertentu untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi.

Salah satu contoh lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah Lembaga Perkreditan Desa yang telah diterapkan di Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut dengan LPD merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Bali. LPD merupakan jenis lembaga keuangan mikro yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Kepemilikan LPD ini biasanya dinaungi oleh desa adat di Bali yang secara otomatis merupakan milik masyarakat desa adat (Jaya & Wisudawan, 2023). Kinerja keuangan LPD dikatakan baik pada saat penilaian seluruh aspek keuangan maupun manajemen yang dilakukan berpredikat “Sehat”. LPD dikatakan sehat apabila dapat menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan produktif dan juga mampu mengatur kelangsungan usaha yang dijalankannya dengan efektif, sehingga mendorong terjaminnya kontinuitas dari usaha Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) tersebut. Keberadaan LPD tersebut sangat membantu masyarakat salah satunya Desa Pekraman Ubud untuk pemodalannya dalam usaha, karena dari segi ekonomi masyarakat di Ubud lebih cenderung bergerak dalam usaha perdagangan.

Suatu lembaga keuangan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tentunya dituntut untuk menyajikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pengguna. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah seperti karyawan, pemberi pinjaman atau kreditor, pemasok atau supplier, manajemen perusahaan, pemerintah pelanggan dan masyarakat.

Menurut PSAK No.1 Tahun 2015 bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Semua lembaga keuangan yang ingin dikelola dengan baik, harus memiliki sebuah catatan yang berisi informasi mengenai semua aktifitas keuangan.

Laporan keuangan perusahaan dapat dinilai berdasarkan kualitas laporan keuangannya. Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas laporan. Laporan keuangan yang berkualitas juga mencerminkan transparansi lembaga keuangan dalam menyajikan informasi, menjelaskan secara jelas kondisi keuangan perusahaan

atau lembaga keuangan, dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan (Sholohah et al., 2019). Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan, begitupun lembaga keuangan yang tidak sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas buruk karena adanya penyimpangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan sering kali terdapat sebuah fenomena yang terjadi. Kecurangan merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam laporan keuangan di suatu lembaga keuangan seperti LPD. Fenomena kecurangan dalam laporan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat mencakup berbagai bentuk tindakan tidak etis, seperti penggelembungan aset, pengurangan kewajiban, atau manipulasi pendapatan dan pengeluaran. Misalnya, pengurus LPD mungkin melaporkan nilai aset yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya untuk menunjukkan kesehatan keuangan yang lebih baik atau menyembunyikan kewajiban untuk memperoleh akses yang lebih mudah ke pendanaan. Praktik semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi LPD. Kecurangan-kecurangan ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi dan kelemahan dalam pengawasan. Ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang tentang standar akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi, yang kadang-kadang dapat disalahgunakan untuk

memanipulasi hasil laporan keuangan. Tanpa pengawasan yang ketat, kecurangan mungkin tidak terdeteksi hingga dampaknya menjadi signifikan dan pengawasan yang lemah mengurangi kemungkinan adanya kontrol yang efektif untuk mencegah manipulasi atau kesalahan dalam laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan dapat memiliki dampak buruk yang signifikan, salah satunya adalah memicu tindakan korupsi. Dengan laporan keuangan yang tidak akurat, keputusan manajerial yang diambil juga akan cenderung salah, berpotensi menyebabkan pengelolaan yang buruk dan memperburuk kondisi keuangan, keadaan ini menciptakan peluang bagi praktik korupsi untuk berkembang dalam rangka menutupi kesalahan atau kerugian. Ketika kecurangan terungkap, kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat menurun drastis. Hal ini dapat mendorong individu atau kelompok tertentu untuk terlibat dalam tindakan korupsi guna melindungi kepentingan pribadi mereka atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Kasus korupsi LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang terjadi di Ubud adalah salah satu kasus yang melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana di tingkat desa. Kasus ini sering melibatkan pengurus atau kepala LPD yang diduga menggunakan dana secara tidak sah atau menyimpang dari peruntukannya. Contoh kasus korupsi yang diunggah oleh (Nusabali.com, 2024) diduga bermula sekitar Tahun 2010-2011 tetapi baru muncul ke permukaan sejak pertengahan 2022 lalu, bertempat di LPD Kedewatan yang beralamat di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud. Awalnya terdakwa Nyoman Ribek selaku bendahara LPD atas sepengetahuan Wayan Mendrawan sebagai ketua LPD dan sekretaris LPD, Made Daging memberikan

kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah total Rp 11 milyar, kemudian direalisasikan seolah-olah menjadi kredit. Namun kredit tersebut dibuat tanpa jaminan. Atas perbuatan ketiga terdakwa tersebut, LPD Kedewatan mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat melayani nasabah. Tindakan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 10 milyar. Adanya tindakan korupsi tentunya mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap LPD tersebut, maka dari itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Dari fenomena-fenomena yang sudah terjadi sebelumnya tentunya kasus tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak lembaga keuangan dan pemangku kepentingannya. Pemahaman Standar Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dikatakan dapat mencegah terjadinya korupsi. Dengan pemahaman yang baik mengenai standar akuntansi, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat akurat dan dapat diandalkan. Badan Pengawas memantau dan mengawasi kegiatan keuangan dan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku, melalui pengawasan yang ketat dapat mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan anti-korupsi, seperti tindakan disiplin yang konsisten menunjukkan bahwa organisasi serius dalam menangani pelanggaran dan dapat mencegah tindakan serupa di masa depan. Teknologi TI memungkinkan pengendalian akses yang ketat, memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat

mengakses data sensitif atau melakukan transaksi tertentu. Secara rutin melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengatasi area yang rentan terhadap korupsi dan menyesuaikan kontrol internal sesuai dengan hasil penilaian risiko untuk mengurangi potensi penyalahgunaan. Semua variabel mampu menekan terjadinya kecurangan dalam penulisan laporan keuangan sehingga kasus-kasus seperti kasus korupsi tersebut dapat ditanggulangi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pemahaman standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud?
- 2) Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud?
- 3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud?
- 4) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud?
- 5) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

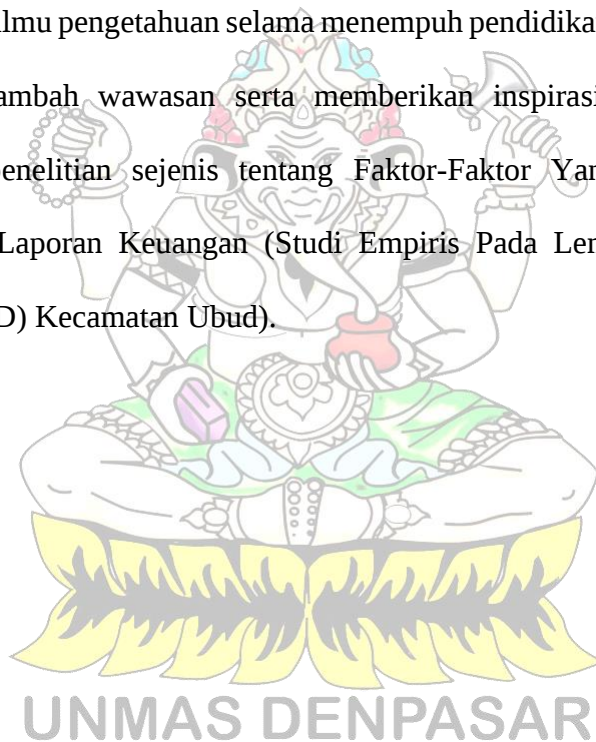
- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori.
 - b) Dapat menambah wawasan mengenai permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan yang berhubungan dengan dunia kerja.
 - c) Dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas, serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud).

2) Manfaat Praktis

Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi LPD yang ada di Kecamatan Ubud, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan diharapkan berguna bagi mahasiswa dan memberi ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan perguruan tinggi, dan menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi mahasiswa dengan penelitian sejenis tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

a) *Adverse selection*, artinya para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar, dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada principal. b) *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan (Jensen, 1976)

2.1.2 Pemahaman Standar Akuntansi

Menurut peraturan Undang-Undang No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasil serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut dibutuhkan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD merupakan laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paham memiliki arti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan, memahami, atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti tentang akuntansi. Seorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah ia yang mengerti dan pandai dalam melakukan proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan. Menurut (Atika et al., 2019) Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai perangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses atau praktik.

Teori keagenan berhubungan dengan pemahaman standar akuntansi dalam kualitas laporan keuangan karena teori ini menangani hubungan antara principal (pemilik) dan agen (manajer) serta potensi konflik kepentingan di antara keduanya. Penerapan standar akuntansi yang konsisten dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan konflik,

meningkatkan transparansi, dan memastikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dengan demikian pemahaman dan penerapan standar akuntansi yang tepat dapat membantu menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.3 Fungsi Badan Pengawas

Fungsi Badan Pengawas adalah secara aktif mengawasi kebijakan operasional, praktik akuntansi, laporan keuangan, dan menjadi penghubung antara pengelola dengan auditor. Peranan badan pengawas sebagai pengawas internal sangat strategis, selain sebagai auditor internal juga sebagai mitra yang bersinergi untuk memajukan LPD.

Peran badan pengawas dalam mengawasi operasional LPD sebagai pihak yang membantu memastikan bahwa laporan keuangan telah dibuat secara efektif tanpa terdapat kecurangan sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan akurat.

Dalam teori keagenan, terdapat masalah utama berupa konflik kepentingan antara *principal* (pemilik) dan agen (manajer) yang bisa menyebabkan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Badan pengawas bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja agen, memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 tahun 2017, yang dimaksud dengan pengawas internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan

LPD. Menurut keputusan Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I Bali, Nomor 491 Tahun 1998 mengenai pembentukan dan kedudukan badan pengawas harus dibentuk badan pengawas LPD sebagai berikut:

- 1) Badan pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-sebanyaknya 2 orang anggota.
- 2) Bendesa adat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- 3) Ketua dan anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai Badan Pengurus LPD.

Adapun tugas dari badan pengawas LPD adalah:

- 1) Mensosialisasikan keberadaan LPD.
- 2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
- 3) Mengawasi proses kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.
- 4) Melaksanakan dengan baik pembinaan dan pengawasan secara berkala atau terjadwal serta identitas sesuai dengan program kerja Badan Pengawas.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Dengan adanya komitmen terhadap

organisasinya, maka setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi yang tinggi dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya agar tujuan organisasi dapat tercapai, sehingga semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin tinggi pula kapasitas sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Hernanda & Setiyawati, 2020).

Teori keagenan mengidentifikasi konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agen (manajer). Jika agen tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi, mereka mungkin tidak menyajikan laporan keuangan yang akurat atau bisa terlibat dalam manipulasi. Sebaliknya, jika manajer memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi dan nilai-nilai etika, mereka lebih cenderung untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur dan akurat.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah teknologi yang bisa dipakai untuk mengolah data, dimana dapat diproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan ataupun manipulasi data dengan bermacam-macam cara supaya nantinya menghasilkan informasi yang akurat, baik kualitasnya dimana dengan kata lain informasi yang digunakan itu relevan, akurat dan tepat waktu untuk dipergunakan baik privasi, usaha atau bisnis dan

juga untuk informasi yang strategi untuk dilakukan pengambilan keputusan (Putri & Djuita, 2021). Dengan menggunakan sistem informasi dapat mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dan setiap proses akuntansi ini dapat mengurangi penggunaan kertas, sistem informasi juga mengontrol keakuratan dengan output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pembuatan laporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dengan memanfaatkan komputer dan jaringan merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam teori keagenan, terdapat risiko bahwa agen (manajer) dapat memiliki keinginan untuk menyajikan informasi yang tidak sepenuhnya akurat demi kepentingan pribadi mereka. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi dengan menyediakan alat yang lebih canggih untuk pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data keuangan. Sistem akuntansi berbasis TI dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan manipulasi dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Setiap Perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang

terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. (Atmadja, 2023)

Teori keagenan menggambarkan konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agen (manajer). Sistem pengendalian internal dirancang untuk meminimalkan konflik ini dengan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pengendalian internal yang efektif membantu mencegah manipulasi laporan keuangan yang bisa timbul dari konflik kepentingan.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari semua transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dimana transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan dan diringkas dalam satuan uang. Terdapat tiga bentuk laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh (Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara umum, yaitu:

1) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis (aset), kewajiban ekonomis (hutang), modal

saham, dan hubungan antara item tersebut. Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan lembaga keuangan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Neraca bisa digunakan sebagai gambaran potret kondisi keuangan suatu lembaga keuangan pada suatu waktu tertentu yang meliputi aset sumber daya LPD dan klaim atas aset tersebut meliputi uang dan saham pribadi.

2) Laporan Laba Rugi

Laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) selama suatu periode tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Hasil dikurangi biaya-biaya merupakan laba atau rugi. Kalau saja lebih besar dari biaya berarti laba sebaliknya kalau masih kecil dari biaya berarti rugi.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu lembaga keuangan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas yang masuk maupun keluar bersih pada suatu periode waktu yang merupakan hasil dari tiga kegiatan pokok LPD yaitu operasional, investasi dan pendanaan.

Adapun teori yang digunakan pada variabel kualitas laporan keuangan yaitu teori keagenan atau *agency theory*. Teori Keagenan

menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer dalam sebuah organisasi. Intinya, teori ini membahas bagaimana pemilik (principal) dapat memastikan bahwa manajer (agen) bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks teori ini, kualitas laporan keuangan penting untuk mengurangi informasi asimetris antara manajer (agen) dan pemilik (principal). Laporan keuangan yang transparan dan akurat membantu pemilik memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan mereka dan mengurangi risiko pengambilan keputusan yang buruk atau perilaku oportunistik dari manajer.

2.1.8 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984 yang kemudian dikukuhkan dalam peraturan pemerintah (Perda) Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 2 tahun 1998 tertanggal 27 Januari dan telah diperbarui kembali dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002, 12 September 2002 serta bagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985 yang dalam kegiatannya banyak menunjang Pembangunan desa atas dasar pertimbangan bahwa:

- 1) Desa Pekraman merupakan lembaga tradisional yang lebih mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama karena pekraman (anggota desa pekraman).
- 2) Desa pekraman mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati dan dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Biasa pekraman merupakan suatu lembaga tradisional yang bersifat kelompok yang didasarkan pada geografi pekraman.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat I Bali No.8 Tahun 2002 juga mencantumkan fungsi dan tujuan LPD antara lain mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif, memberantas gadaai gelap dan sejenisnya, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.922 Tahun 1984, di sana disebutkan LPD adalah alat bagi desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat berharga lainnya, dan selanjutnya pada Tingkat I Bali No.8 Tahun 2001, LPD merupakan Badan Usaha Milik Desa Pekraman yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa untuk krama desa. Peraturan Gubernur Bali No.3 Tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pekraman yang berkedudukan di wewidangan desa pekraman. Landasan operasional

berpegangan pada awig-awig desa pekraman, yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga desa pekraman.

LPD merupakan lembaga keuangan yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya. Maka dari itu perlu dibina, ditingkatkan kinerja dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya. Menyimak pendapatan dan pengertian di atas bahwa Perda yang secara konstitusi mengatur tentang keberadaan LPD serta lapangan usaha LPD tersebut, maka LPD merupakan badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi mempunyai tujuan memperoleh keuntungan, di mana dari keuntungan tersebut dialokasikan untuk cadangan modal 60%, dari pembangunan desa adat 20%, jasa produksi 10%, dana pembinaan pengawasan dan lindungan 5% dan dana sosial sebanyak 5% oleh karena itu, LPD hampir sama dengan lembaga bisnis lainnya dalam operasionalnya menghadapi persaingan, agar mampu bersaing dan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien harus menggunakan prinsip manajemen dan memilih strategi yang tepat. Ilmu yang mempelajari tentang penentuan strategi ini dikenal dengan nama manajemen strategi.

Ada enam kegiatan usahanya menerima dan menyalurkan dana kepada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa dia merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. LPD sebagai

lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembimbingan dan pengawasan. Pengawasan LPD dilakukan oleh badan pengawas yang diangkat dan dihentikan oleh krama desa melalui forum dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai kepala daerah.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

- 1) Sinarata, Putra, dan Saitri (2019) meneliti tentang Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) yaitu etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Sinarata et al., 2019)
- 2) Pratama dan Yahya (2019) meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi

sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pemanfaatan Teknologi Informas (PT), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Secara parsial, masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pratama & Yahya, 2019)

- 3) Dewi dan Ernawatiningsih (2019) meneliti tentang Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa LPD di Kota Denpasar. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, kualitas sistem informasi akuntansi dan kualitas sumber daya manusia. sedangkan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan bantuan operasi sekolah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan hasil bahwa Tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Dewi & Ernawatiningsih, 2019)
- 4) Tampubolon dan Basid (2019) meneliti tentang Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi

Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Tampubolon & Basid, 2019)

- 5) Lestari dan Dewi (2020) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan variabel terikat (dependen). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil analisis bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Lestari & Dewi, 2020)
- 6) Bhagwati dan Novarini (2021) meneliti tentang Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pengalaman Kerja, Tingkat

Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan LPD di kota Denpasar. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) yaitu sedangkan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Bhegawati & Novarini, 2021)

- 7) Lesmana (2021) meneliti tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kelurahan Pasarbatang. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem Pengendalian internal sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan variabel terikat (dependen). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Lesmana, 2021)
- 8) Anggreni (2021) meneliti tentang Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada lembaga pernikahan Desa LPD se-kota Denpasar. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi

sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan Variabel terikat (dependen). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan (Anggreni, 2021)

- 9) Pramesti, Endiana, dan Ardilia (2021) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan GCG sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan Variabel terikat (dependen). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis memerlukan bahwa sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi dan GCG berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Pramesti et al., 2021)
- 10) Yulianingsih, Suryandari, dan Putra (2021) meneliti tentang Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) yaitu etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika kepemimpinan, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Yulianingsih et al., 2021)

11) Wati, Suryandari, Munidewi (2021) meneliti tentang Pengaruh Etika Kepemimpinan, Audit Internal, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu etika kepemimpinan, audit internal, kualitas sistem informasi akuntansi dan tingkat pemahaman akuntansi sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas pelaporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa audit internal, kualitas sistem informasi akuntansi dan Tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan (Wati et al., 2021)

12) Apriada dan Wulandari (2022) meneliti tentang Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Fungsi Badan Pengawas, sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan Variabel terikat (dependen). Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil

analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengendalian internal dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Apriada & Wulandari, 2022)

13) Nur, Sopanah, dan Puspitasarie (2023) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini memberikan variabel bebas (independen) yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan pemahaman akuntansi, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Nur et al., 2023)

14) Kariani, Endiana, Kumalasari (2023) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada LPD di Kecamatan Sukawati. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) yaitu etika kepemimpinan, pemahaman standar akuntansi, fungsi badan pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika kepemimpinan, pemahaman standar akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan (Kariani et al., 2023)

- 15) Ayem dan Ahamala (2023) meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Yogyakarta). Penelitian ini memiliki variabel bebas (independen) yaitu pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Ayem & Ahamala, 2023)